

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembahasan mengenai aktor *intermediary* di Indonesia akhir-akhir ini sudah banyak berkembang. *intermediary*, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penghubung atau penengah. Maka dari itu, aktor *intermediary* hadir dan telah berkembang aktor-aktor *intermediary* yang memposisikan dirinya sebagai jembatan yang menghubungkan negara dengan masyarakat. Hal itu dimaksud dalam hal dilihat dari peran mereka dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang sering kali sulit untuk dijangkau oleh negara.

Dalam perkembangan politik kontemporer, berbagai langkah telah dilakukan oleh aktor *intermediary* dalam peran dan fungsinya sebagai *state-society relation*. Dalam ranah non-elektoral, biasanya wadah yang digunakan berbentuk NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan atas dasar tujuan tertentu. Hadirnya LSM di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sudah tidak dapat dinafikan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pemerintah atau negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara menyeluruh, dan atau keterbatasan masyarakat dalam memenuhi tuntutan mereka kepada negara. Sehingga pada akhirnya peran tersebut diambil alih oleh para aktor *intermediary* dalam meniadakan antara masyarakat dengan negara

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk dalam jenis lembaga non-elektoral *intermediary*. Lembaga Swadaya Masyarakat atau dengan nama lain yaitu *Non Government Organization* (NGO) adalah organisasi non pemerintah (Onop) yang hingga saat ini keberadaannya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Diperkiraan hingga saat ini sudah lebih dari 1.000 LSM yang tersebar dan beroperasi di Indonesia, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun di tingkat Kecamatan. Hal ini diperkirakan akan bertambah dari tahun ke tahun. Beberapa faktor-faktor yang mendorong terus bertambahnya LSM di Inodesia yaitu adanya perkembangan politik, pembangunan ekonomi, demokrasi serta kemajuan teknologi lain yang dirasa sangat pesat dalam perkembangannya. (Praja, 2009:11).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum dapat diartikan sebagai lembaga non profit yang dibangun oleh perorangan ataupun sekelompok dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat, secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak ada keinginan untuk mengambil keuntungan dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Budi Setyono (2003), LSM merupakan sebuah lembaga atau organisasi yang non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggara pemerintah serta dalam kehidupan politik. LSM dipandang memiliki peran atau fungsi yang signifikan dalam proses demokratisasinya. Fungsi dan karakteristiknya yang dimiliki oleh organisasi ini divakini berbeda dari organisasi

pemerintah maupun sektor swasta, sehingga LSM dipandang sebagai organisasi yang mampu menjalankan tugas-tugas tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh kedua organisasi atau sektor tersebut.

Kemunculan LSM di tengah-tengah masyarakat merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga negara atau dalam hal pemenuhan hak-hak sebagai warga negara yang sulit dijangkau oleh negara. Maka dari itu, LSM hadir sebagai perpanjangan tangan antara negara dengan masyarakat ataupun sebaliknya. Dalam sistem politik yang demokratis ini lah, LSM bersama-sama dengan pemerintah memberikan sumbangan penting dalam memberikan hak-hak warga negara yang sudah sepatutnya untuk mereka dapatkan.

LSM memiliki karakteristik yang berbeda dari organisasi politik yang berorientasi pada kekuasaan dan swasta yang berorientasi pada komersial. LSM secara konseptual memiliki karakteristik yang memiliki ciri: non partisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela dan berasaskan pada gerakan moral (Praja, 2009:13). Dari ciri-ciri ini menjadikan LSM dapat bergerak secara luwes tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi. Ciri-ciri tersebut juga dapat membuat LSM dapat menyuarakan aspirasi masyarakat ataupun melayani kepentingan masyarakat yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor politik maupun sektor swasta.

Salah satu LSM yang diambil penulis untuk dijadikan sebagai studi kasus dalam penelitian ini yaitu LSM SATUNAMA yang berada di Yogyakarta. LSM SATUNAMA merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, advokasi dan pelatihan. Dalam LSM SATUNAMA, terdapat banyak melakukan kerjasama dengan Pemerintah, salah satu contohnya dalam bidang advokasi yang bekerjasama dengan Kabupaten Sleman.

SATUNAMA atau yang disebut dengan Yayasan SATUNAMA banyak melakukan kegiatan-kegiatan berupa *Talk Show*, pelatihan, kelas, seminar, penelitian dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu kegiatan yang dimuat dalam website satunama.org tentang kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman dengan SATUNAMA Yogyakarta dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sleman menggelar sekolah Pemilu untuk pemuda, memaknai kualitas penyelenggaraan Pemilu sebagai demokrasi yang bersih dari politik uang, inklusif. Kegiatan kerjasama ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh KPU Sleman sebagai wadah pembelajaran bagi pemuda di Sleman untuk proses pematangan demokrasi dengan pendidikan politik dan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum. LSM SATUNAMA banyak melakukan kegiatan yang tidak hanya di lingkup DIY saja, tetapi juga sampai ke luar Jawa, diantara seperti Lombok, Aceh, Papua dan juga

Hadirnya LSM di tengah-tengah masyarakat sangat membantu pemerintah dalam menyelesaikan tugas sebagai aktor yang mensejahterakan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Berikut beberapa manfaat adanya kerjasama LSM dengan pemerintah, antara lain: penyampaian pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan baik, banyaknya interaksi dengan kelompok sasaran dalam suatu program atau proyek, koordinasi dengan LSM menjadi lebih baik, kesempatan untuk memperbaiki atau menambah pelayanan pemerintah secara internal dan lebih banyak informasi yang dapat disampaikan masyarakat kepada pemerintah. Namun disisi lain adapula kekurangan dari adanya kerjasama tersebut, antara lain: menimbulkan kontrol pemerintah yang lebih besar dengan adanya keputusan yang sepihak, LSM tumbuh dengan karakter yang lebih birokratis, LSM kehilangan otonomi dan menjadi tidak mandiri dan juga penggantian pelayanan pemerintah oleh LSM menambah inefisiensi pemerintah dan membebaskan pemerintah dari tanggungjawab.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya aktor-aktor *intermediary* yang hadir dan memposisikan dirinya dalam menjembatani hubungan negara dengan masyarakat. Tapi tidak dapat dinafikan bahwa banyak LSM, yang merupakan aktor non-elektoral *intermediary* yang dalam pelaksanaannya tersebut hanya digunakan sebagai kedok untuk mencari keuntungan semata dan peran LSM hanya digadaikan untuk kepentingan pribadi saja. Masalah sumber dana menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh LSM, seperti yang ditulis dalam tesis

Praja (2009:22) mengatakan bahwa sudah terlihat di tingkat nasional bahwa ada LSM yang memilih merubah arah ideologis sesuai dengan penyandang dananya. Alhasil banyak LSM yang memilih berkompromi dengan pemerintah ketika peluang politik tersedia.

Dari data kerjasama diatas dapat dilihat bahwa banyaknya kegiatan relasi yang dibangun antara LSM SATUNAMA dengan Pemerintah di Kabupaten Sleman begitu juga dengan Pemerintah dalam lingkup DIY. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa SATUNAMA banyak menjalin relasi dengan pemerintah DIY. Dimana ada relasi, maka disana juga ada kekuasaan. Relasi kuasa (*power relation*) merupakan hal yang ada dan muncul dalam hubungan antar manusia. Tak terkecuali dalam politik. Isu relasi kuasa senantiasa mendasari setiap proses politik dalam tingkat individual dan kelompok. Relasi kuasa merupakan esensi dari berpolitik. Sementara politik merupakan sebuah alat untuk mengadakan keadilan dan kesejahteraan. Idealnya, dalam relasi kuasa terdapat negosiasi dan perimbangan. Maka dari itu, peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul tentang relasi kuasa antar aktor *intermediary* dan pemerintah. Karena dalam hal ini, relasi kuasa antar aktor *intermediary* merupakan sesuatu yang kebanyakan orang belum mengetahui akan hal itu. oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu bagaimana relasi kekuasaan antara LSM SATUNAMA sebagai kekuatan masyarakat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai representasi negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan relasi kuasa yang ada antara LSM SATUNAMA dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan program kerjasamanya.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ataupun manfaat kepada semua pihak. Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai beriku;

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi ataupun pengetahuan terhadap kajian-kajian tentang relasi kuasa dari aktor *intermediary* yang relatif masih terbatas

- b. Dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan bagi peneliti dalam bidang ilmu kajian relasi kuasa serta tentang aktor *intermediary*
- c. Bagi peneliti berikutnya atau peneliti lain dalam bidang yang sama dengan topik berbeda, dapat menjadi referensi mengenai konsep relasi kuasa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada LSM Satunama terkait konsep dari relasi kuasa
- b. Bagi jurusan Ilmu Pemerintahan dapat menjadi bahan referensi dalam penyusunan tugas akhir khususnya tentang relasi kuasa dan aktor *Intermediary*

1.5. Review Literatur

Review literatur merupakan tahapan penting yang perlu dilakukan karena untuk menunjukkan adanya penelitian sebelumnya oleh orang lain yang serupa ataupun mirip terkait dengan relasi antar aktor dalam keberlangsungan suatu kebijakan maupun kegiatan tertentu. Diperlukan juga untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya atau dengan kata lain tidak mengulang yang sudah ada dan ada unsur kebaruan di dalamnya. Pada bagian ini memuat teori,

temuan, dan fokus kajian dari tiap penelitian. Dalam penelitian kali ini, ditemukan beberapa sumber berupa skripsi dan thesis yang memiliki kesamaan tema besar dengan penelitian yang peneliti angkat.

1. Penelitian pertama yaitu skripsi dari Chandra Puspitasari Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM tahun 2007. Penelitian tersebut berjudul “Relasi Tiga Aktor dalam Pengelolaan Parkir di Malioboro: Studi Tentang Relasi Kepentingan antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengelolaan Parkir di Malioboro”. Dalam penelitian tersebut, bentuk dan relasi antara tiga aktor yang ada dijabarkan menggunakan Teori Governance. Dimulai dari sudut pandang terminologinya, dari segi fungsionalnya, dan konsep relasi yang ada itu sendiri. Fokus kajiannya adalah bagaimana menjelaskan peran pemerintah dalam mengatur perizinan yang ada khususnya mengenai masalah perparkiran di kawasan Malioboro. Dijabarkan pula bahwa pemerintah justru mendapatkan stigma yang kurang baik atau kata lain kurang dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola parkir yang ada.
2. Penelitian kedua yaitu skripsi dari Rendy Riananda Jurusan Sosiologi UGM tahun 2014 yang berjudul “JASA PELAYANAN PARKIR: Studi tentang Relasi Antar Aktor dalam Pengelolaan Jasa Pelayanan Parkir di Kawasan Belania dan Hiburan Seturan Kecamatan Depok

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi tersebut membahas mengenai bentuk dan pola interaksi serta relasi sosial yang terjadi antara para juru parkir dengan pemilik lahan usaha dan memberikan lahan parkir dengan menggunakan paradigma definisi sosial dan teori interaksionisme simbolik. Fokus kajiannya adalah memperlihatkan peran aktor yang menggunakan jasa pelayanan serta penyelesaian masalah oleh penyedia jasa pelayanan dalam relasi sosial yang terjadi di dalamnya.

3. Penelitian ketiga yaitu thesis dari Muhammad Anshori Jurusan Ilmu Politik UGM 2011 yang berjudul “Politik Pengelolaan Hak Bersama” yang membahas mengenai dinamika relasi kuasa dalam pengelolaan perkebunan karet rakyat melalui lembaga kesejahteraan desa di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Thesis tersebut menggunakan konsep mekanisme pengelolaan sumberdaya kepemilikan bersama dan relasi struktur kekuasaan. Fokus kajian penelitiannya lebih menitikberatkan pada proses dan mekanisme pengelolaan sumberdaya, siapa saja aktor yang berperan, dan analisa mengenai pola relasi kuasa dalam pengelolaan tersebut.
4. Penelitian keempat yaitu disertasi dari Pahada Hidayat Program Studi Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada 2015 yang berjudul “Kontestasi dan Relasi Kuasa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah: Studi Kasus pada Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Disertasi tersebut menggunakan kerangka teori kontestasi, konsep relasi kuasa, dan juga konsep ruang publik. Fokus kajiannya adalah mengenai konstruksi pembangunan oleh negara melalui program PNPM, bentuk-bentuk tegangan dan negosiasi antara masyarakat dan pemerintah, dan dinamika kultur lokal dalam merespon perubahan sosial sebagai dampak dari program pembangunan yang ada.

5. Penelitian kelima yaitu skripsi dari Adninda Gusnia Putri Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada 2014 yang berjudul “Pola Relasi Kuasa Antara Negara, NGO, dan Masyarakat dalam Proses Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan: Studi Posdaya Delima, Gemawang, Sinduadi, Mlati, Sleman”, skripsi ini menggunakan kerangka teori yaitu kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pola relasi NGO terhadap negara. Fokus kajian penelitiannya yaitu mengenai bagaimana strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Posdaya Delima dalam mengentaskan kemiskinan dan juga pola relasi kuasa yang terbangun antara negara, NGO, dan masyarakat.

6. Penelitian keenam yaitu tesis dari Reni Shintasari Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada 2013 yang berjudul “Studi Relasi Pemerintah Desa, Perusahaan, Masyarakat Desa Ponggok terkait CSR PT TL Aqua Danone”. Tesis ini menggunakan teori

governance, CSR, dan patronase. Fokus penelitiannya adalah mengenai relasi antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat pada penganggaran CSR PT TIA Danone Klaten di Desa Pongkok dan juga dampak CSR tersebut terhadap aktor lain yang terkait.

7. Penelitian ketujuh adalah skripsi dari Dhienda Viola Dewinta Jurusan Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada 2015 yang berjudul “Relasi Antar Aktor Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Masyarakat & PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) dalam Keterkaitannya dengan Fenomena Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta”. Fokus kajiannya adalah mengenai pola relasi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan aktor lain terkait dengan fenomena dan pembangunan hotel. Penelitian ini menggunakan konsep relasi antara state dan society, kemitraan, dan teori konflik.
8. Penelitian kedelapan adalah thesis dari Yoga Suharman Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada 2015 yang berjudul “Relasi Kekuasaan Pengetahuan dalam Wacana *Global War On Terror*”. Fokus kajiannya adalah mengenai bentuk relasi kekuasaan yang ada dalam wacana perang melawan terorisme global dan mekanismenya. Penelitian ini menggunakan teori kekuasaan modern.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan tema besar yaitu mengenai relasi kuasa antar aktor. Penelitian yang peneliti lakukan kali ini

memuat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya tersebut. Pertama adalah fokus kajian yang diteliti yaitu mengenai relasi kuasa yang ada antar aktor *intermediary*, dalam hal ini yaitu Yayasan SATUNAMA dengan pemerintah. Kedua adalah segi teori yang digunakan, peneliti menggunakan teori peran masyarakat sipil dan konsep relasi kuasa. Ketiga adalah pembahasan adalah mengenai relasi kuasa yang termuat antar dua aktor yaitu pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (*state*) dan Yayasan SATUNAMA (*society*). Penelitian dilakukan untuk mengetahui pola relasi kuasa yang ada antara SATUNAMA dengan Pemerintah DIY dari awal berdirinya hingga sampai saat ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini up to date dengan realitas saat ini.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Relasi Kuasa

Teori mengenai kekuasaan dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh salah satu filsafat politik, yaitu Michel Foucault dalam Mills dalam Yunitamurti (2015:25). Dalam penjelasannya, Foucault menilai bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dapat dinilai. Kekuasaan yang diartikan oleh Foucault yaitu sebagai sebuah kata kerja dan bukan kata benda. Kekuasaan juga dapat diartikan sebagai sebuah strategi. Kekuasaan bukanlah suatu hubungan yang menindas maupun ditindas. Tetapi kekuasaan adalah sebuah strategi yang berfungsi dalam sebuah

jalinan atau relasi yang berlangsung terus – menerus. Relasi kuasa dapat terjadi dimana saja, seperti dalam hubungan keluarga, hubungan yang terjadi dalam sebuah institusi, kelompok kerja dan lain sebagainya. Individu tidak dilihat sebagai objek yang menerima kekuasaan, akan tetapi dilihat sebagai aktor yang ikut ‘bertarung atau dilihat ‘tempat’ dimana kekuasaan itu ditetapkan dan ditentang.

Foucault (Sulistya dkk., 2011: 135) mendefinisikan relasi kuasa sebagai sesuatu yang membuat orang patuh. Relasi kuasa merupakan konsep hubungan kekuasaan yaitu praktik-praktik kekuasaan dari subyek pada obyek melalui berbagai media dan rupa. Kekuasaan yang dimaksudkan tidak didapat dari cara cara yang represif, melainkan secara manipulatif dan hegemonik. Kekuasaan, bagi Foucault (2007) adalah soal praktik-praktik konkrit yang lantas menciptakan realitas dan pola-pola perilaku, memproduksi wilayah objek-objek pengetahuan dan ritual-ritual kebenaran yang khas. Praktik-praktik itu menciptakan norma-norma yang lalu direproduksi dan dilegitimasi melalui para guru, pekerja sosial, dokter, hakim, polisi dan administrator, misalnya. Kekuasaan mewujudkan diri dalam pengetahuan, tetapi pengetahuan pun lantas melahirkan kekuasaan.

Foucault berpendapat bahwa kekuasaan merupakan hal yang tidak hanya dimiliki oleh Negara. Kekuasaan bagi Foucault ada dimana-mana, karena bagi dia kekuasaan merupakan satu dimensi dari sebuah relasi. Dari

penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah relasi akan diikutsertakan pula dengan kekuasaan, adanya relasi maka adapula yang namanya kekuasaan.

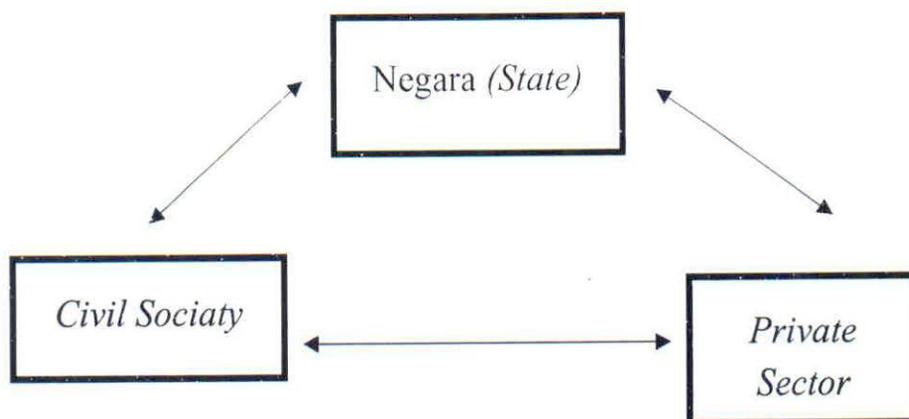
1.6.2. Konsep Relasi Kuasa dalam konsep Governance

Dalam konteks *governance* pola relasi kekuasaan ditandai dengan hadirnya masyarakat (institusi atau komunitas), pemerintah (pusat dan daerah), dan pasar (pelaku bisnis *entrepreneur*). Pemerintah bukan satu-satunya aktor yang berperan penuh atau memiliki kekuasaan secara mutlak. Relasi pada dasarnya merupakan bentuk konkret hubungan yang terbentuk karena adanya interaksi dari unsur dua pihak atau lebih. Pihak-pihak yang terlibat tersebut memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing.

Secara teoritis, dikenal ada tiga bentuk relasi, yaitu dominasi, hegemoni, dan kooptasi. Dominasi adalah hubungan yang dicirikan oleh adanya pihak yang didominasi. Hegemoni adalah hubungan dalam basis intelektual dan etika yang dapat diterima oleh rakyat yang diperintah. Di pihak lain, kooptasi merupakan suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, yang merupakan salah satu cara yang menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan (Sukeni, 2009:57)

Pemerintah dengan menggunakan teori *governance* dalam membangun relasi diharapkan mampu mengurangi adanya konflik akibat benturan kepentingan yang ada. Karena suatu kebijakan akan dapat terlaksana dengan lebih baik apabila dalam proses implementasinya melibatkan aktor-aktor lain selain pemerintah. Aktor tersebut adalah swasta (*private sector*) dan masyarakat. Perlu adanya ruang sinergi atau kerjasama yang ada antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta. Ruang ini harus tetap dibuka untuk menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak bisa lebih optimal. Sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Manfaat baikpun diperoleh oleh semuanya akibat hubungan baik yang terjalin di dalamnya.

Konsep relasi dapat dilihat secara lebih jelas pada bagan berikut:



Gambar 1.1 Konsep Relasi antar Aktor

Keterangan:

↔ = Relasi

□ = Aktor / wilayah / sektor

1.6.2.1. Relasi antara Negara dengan Masyarakat

Pola yang terbentuk antara pemerintah dengan masyarakat adalah sebagai berikut: (Tim Penyusun S2 PLOD. 2004:50)

a) Pola Otoritarian

Pola otoritarian menempatkan posisi pemerintah pada tempat tertinggi sedangkan masyarakat berada di posisi subordinatif. Negara mendominasi proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan. Masyarakat dikondisikan pada posisi pasif dan perannya nyaris terpinggirkan. Dinamika dalam proses pengambilan keputusan yang ada lebih merupakan refleksi dari kompetisi kepentingan antar sejumlah aktor pemerintah.

b) Pola Hubungan Transisional

Pada pola ini sosok dominan dari pemerintah atau negara sudah mulai mencair dan muncul partisipasi masyarakat. Peran masyarakat serta sektor lainnya masih dibatasi oleh pemerintah dalam proses perumusan kebijakan politik. Pola hubungan transisional diwarnai oleh ketegangan, konflik, bahkan perlawanan dari masyarakat karena produk politik yang ada hanya menguntungkan pemerintah.

c) Pola Hubungan Demokratis

Pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat secara politik posisinya setara. Pemerintah tidak lagi melakukan dominasi. Pemerintah dan masyarakat sama-sama diikat oleh satu aturan main untuk saling mengisi dan mendorong serta ada interaksi timbal balik dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Pola-pola di atas menunjukkan bentuk relasi dari posisi , sedangkan untuk model hubungan yang dibentuk dari dua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat dapat dilihat pada model-model hubungan sinergis. Model hubungan sinergis tersebut yang dapat terbentuk dari relasi pemerintah (*state*) dengan masyarakat (*society*): (Tim Penyusun S2 PLOD. 2004:57)

a. Model Kemitraan (*partnership*)

Model ini terdapat dasar yaitu kepercayaan satu sama lain dan kesetaraan. Sehingga masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan masyarakat politik bersama dengan pemerintah dapat bekerja sama.

b. Model Reprositas-Kritis

Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dilakukan dengan cara keduanya saling mempelajari posisi masing-masing dari keduanya. Selain itu juga saling menerima dan memberi dukungan.

c. Model Akomodasionis

Baik dari pemerintah maupun masyarakat saling melakukan politik akomodasi.

1.6.2.2. Relasi antara Masyarakat dengan dengan Swasta/ Privat Sector

Variasi bentuk relasi antara negara (*state*) dengan sektor swasta/privat (*private sector*) dapat dibedakan kedalam 3 hal yaitu: (Tim Penyusun S2 PLOD. 2004:17)

- a) Tingkat alokasi resiko antara pemerintah dengan swasta.
- b) Tingkat kebutuhan tenaga ahli pada masing-masing pihak.
- c) Implikasi potensial terhadap tingkat pembayaran.

Pemerintah memerlukan kerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan pembangunan atau pembenahan baik dalam bentuk tanggung jawab dan jangka waktu. Terdapat lima bentuk kerjasama antara sektor pemerintah (*state*) dengan sektor swasta/privat (*private sector*), yaitu sebagai berikut: (Tim Penyusun S2 PLOD. 2004:17)

a) Kontrak Pelayanan (*Service Control*)

Merupakan bentuk kerjasama dimana mitra swasta diberi tanggung jawab melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam suatu jangka waktu tertentu.

b) Kontrak Kelola (*Management Contract*)

Merupakan bentuk kerjasama dimana mitra swasta diberi tanggung jawab untuk mengelola prasarana/sarana milik pemerintah (yang dikontrakkan adalah jabatan dalam suatu organisasi/management saja).

c) Kontrak Sewa (*Leased Contract*)

Merupakan bentuk kerjasama dimana mitra swasta menyewakan ke pemerintah suatu fasilitas infrastruktur tertentu dalam suatu jangka waktu tertentu untuk kemudian dioperasikan dan dipelihara.

d) Kontrak Bangun (Rehabilitasi)

Merupakan hubungan dimana mitra swasta bertanggung jawab dalam membangun proyek infrastruktur, dan tahap selanjutnya ditentukan oleh persetujuan dari kedua belah pihak.

e) Kontrak Konsesi (*Consession Contract*)

Merupakan bentuk kerjasama dimana mitra swasta diberi tanggung jawab menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas. Serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

1.6.2.3. Relasi antara Masyarakat (*society*) dengan Swasta/ *Privat Sector*

Dalam *governance*, peran masyarakat dilibatkan dalam bidang sosial politik maupun ekonomi. Pemberian kesempatan oleh negara

dan swasta semakin terwujud dengan adanya ruang untuk bergerak yang sering disebut dengan civil society.

Pola dan bentuk relasi antara masyarakat dengan swasta adalah sebagai berikut:

- a) Partisipasi : Terdapat pemberian kesempatan atau ruang dari satu pihak ke pihak yang lain untuk saling melakukan relasi.
- b) Aktualisasi : Dalam relasi terdapat usaha-usaha untuk mensosialisasikan ide-ide atau usaha menunjukkan keberadaan.
- c) Konflik : Relasi memuat benturan nilai dan kepentingan.
- d) Korporasi : Relasi berbentuk kerjasama untuk tujuan ekonomi atau bisnis. Biasanya berangkat dari persamaan kepentingan sosial ekonomi atau perasaan senasib.
- e) Transaksi : Dalam relasi terdapat pertukaran jual beli yang saling menguntungkan secara materiil ataupun ekonomi.

1.6.3. Peran Masyarakat sipil

Peran masyarakat sipil dalam suatu proses demokrasi sangatlah penting. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tentang pentingnya peningkatan peran masyarakat sipil dalam demokratisasi di Indonesia. Masyarakat sipil pada dasarnya merupakan masyarakat yang mandiri atau otonom, yakni mampu memajukan diri

sendiri, dapat “membatasi” intervensi pemerintah dan negara dalam realitas yang diciptakan, serta senantiasa memperlihatkan sikap kritis dalam kehidupan politik. Sejumlah karakteristik penting entitas masyarakat sipil yang menjadi rujukan studi ini mengadu pada ciri-ciri utama, yakni otonomi politik berhadapan dengan negara, di samping aspek keswadayaan (*self supporting*), dan keswasembadaaan (*self generating*).

Secara operasional, sosok masyarakat sipil yang dimaksud meliputi institusi-institusi non-pemerintah yang berada di masyarakat yang mewujudkan diri melalui organisasi, perkumpulan atau pengelompokan sosial dan politik yang berusaha untuk membangun kemandirian seperti organisasi sosial dan keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), paguyuban, kelompok-kelompok kepentingan, dan sebagainya yang juga bisa mengambil jarak dan menunjukkan otonomi terhadap negara. Persoalan penting untuk dijawab dan sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadap proses demokratisasi yang bergulir. Hal ini amat penting menjadi perhatian mengingat bahwa dalam dua puluh lima tahun ke depan sasaran pembangunan politik Indonesia adalah mencapai apa yang disebut demokrasi yang terkonsolidasi sebagaimana telah ditetapkan dalam UU

Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

Masyarakat sipil merupakan sebuah konsep yang sangat luas. Seperti yang dikemukakan oleh Cohen dan Arato (1991), mendefinisikan bahwa masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial yang didalamnya mencakup semua kelompok sosial paling akrab seperti halnya keluarga, asosiasi (terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi lainnya yang dibentuk melalui aspek-aspek pengaturan dan mobilisasi diri secara independen baik dalam hal kegiatan maupun kelembagaan.

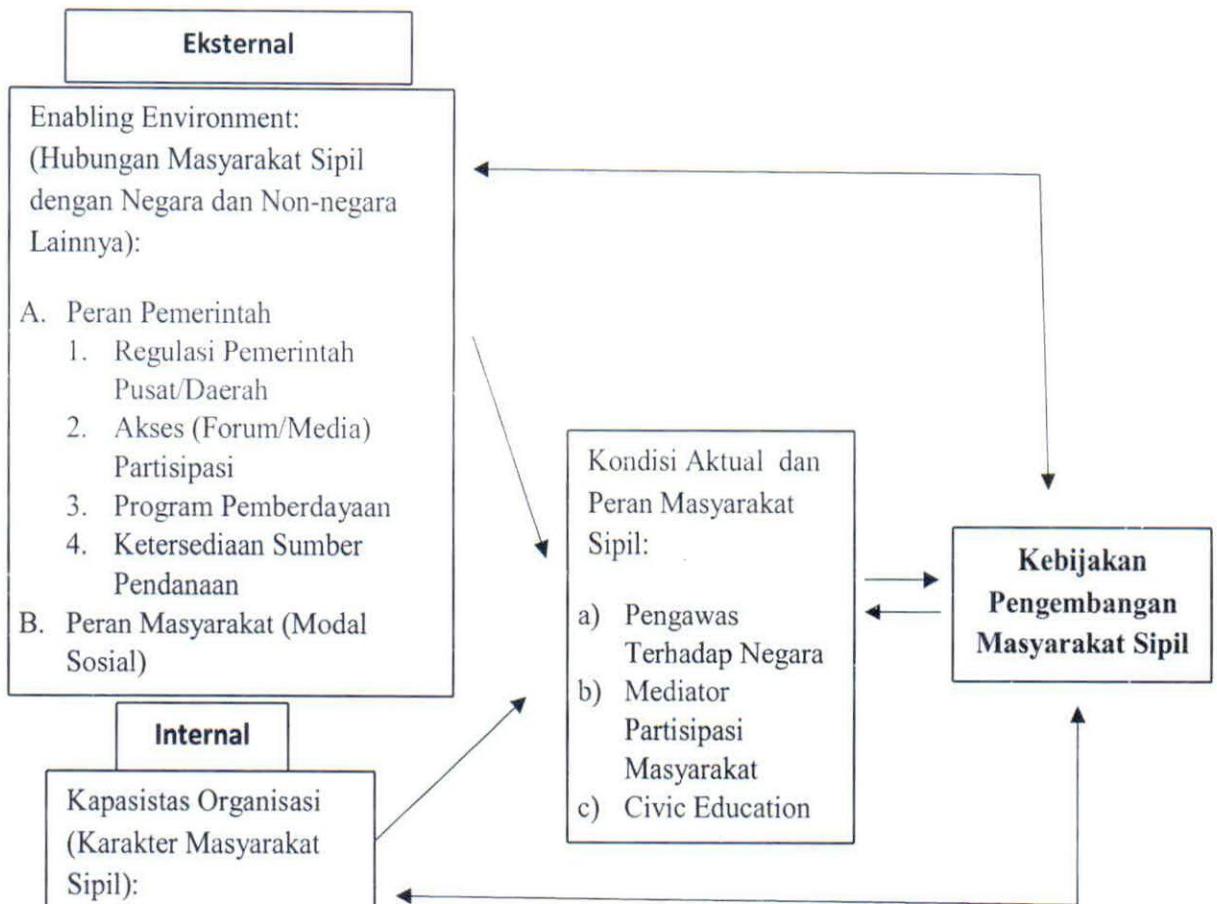
Pendapat lain dikemukakan oleh Gramsci (1971) yang mengartikan masyarakat sipil sebagai kumpulan organisme "*private*", berbeda dengan negara yang disebutnya masyarakat politik (*political society*). Secara konkret, Gramsci menegaskan masyarakat sipil sebagai suatu wilayah institusi privat mencakup gereja, serikat-serikat dagang/pekerja, dan lembaga pendidikan, sementara negara adalah institusi-institusi publik seperti pemerintah, pengadilan, polisi dan tentara. Gramsci terkadang mendefinisikan negara sebagai masyarakat politik ditambah masyarakat sipil – "*the state should be understood not only as the apparatus of the government, but also the private apparatus of Civil Society*" (negara tidak harus dipahami hanya sebagai lembaga pemerintahan, tetapi juga sebagai lembaga masyarakat sipil).

Hikam (1996) memberikan ciri yang lebih spesifik mengenai MS yakni *pertama*, memiliki kesukarelaan dalam bekerja untuk mewujudkan komunitasnya menjadi lebih baik. Dalam pengertian ini juga dibarengi dengan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita yang dituju. *Kedua*, keswasembadaan, setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, mandiri yang kuat tanpa menggantungkan pada negara atau lembaga-lembaga negara atau organisasi lainnya. *Ketiga*, kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. *Keempat*, keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan. Ilmuwan Islam Madjid (1999) memberikan ciri yang berbeda tentang konsep ini yakni, Semangat egalitarianisme atau kesetaraan, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestise, keterbukaan, partisipasi seluruh anggota masyarakat, penentuan kepemimpinan melalui pemilihan.

Di berbagai belahan dunia, keberadaan masyarakat sipil tidak dapat dilepaskan dari organisasi yang menjadi basis pemikiran dan sekaligus penekan, namun tidak berorientasi terhadap kekuasaan. Organisasi ini ditempatkan diluar struktur dan kepentingan kekuasaan dominan. Oleh karenanya organisasi ini sering ditempatkan sebagai simbol oposan yang terlenas dari koontasi kekuasaan resmi. Label

oposan ini kemudian menjadi ciri utama dengan nama *non goverment organizations* (NGO's) atau organisasi non pemerintah (Ornop), sebuah istilah yang mengandung makna oposisi. Penggunaan istilah tersebut juga kemudian berkembang menjadi LSM yang kemudian dilegalisasi melalui sejumlah regulasi. Sekalipun istilah ini memancing perdebatan, namun nampaknya "untuk sementara" publik sepakat bahwa masyarakat sipil sebagai kekuatan di luar negara yang tumbuh dari prakarsa kelompok-kelompok sipil

Gambar 1.2. Aspek Eksternal dan Internal



1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Relasi

Relasi adalah hubungan atau banyak hubungan baik hubungan antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Relasi kekuasaan antar pemerintah dengan masyarakat sipil dapat dilihat melalui beberapa pola hubungan dalam konsep governance, antara lain; (1) Pola Hubungan Otoritarian, (2) Pola Hubungan Transisional, (3) Pola Hubungan Demokratis. Dalam pola hubungan ini akan dilihat bagaimana pola hubungan yang ada antara negara dengan masyarakat sipil yang dimulai dari pembahasan terkait aktor yang lebih dominan, kesetaraan dalam menjalankan sebuah relasi dan dukungan antar aktor dalam melakukan sebuah relasi.

1.7.2. Kekuasaan

Kekuasaan adalah sebuah kata kerja, sebuah strategi. Konsep kekuasaan tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan berfungsi dalam sebuah jalinan atau relasi, bukan hanya sebagai hubungan antara menindas dan ditindas. kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan bagi Michel Foucault ada di mana-mana, karena kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Artinya, di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Anthony Giddens dalam teorinya Penstrukturan Adaptif (*Adaptive Structuration*) yang mengatakan kekuasaan

merupakan kekuatan yang berpengaruh dalam mencapai keputusan dalam organisasi.

1.7.3. Aktor

Aktor dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang mempengaruhi terjadinya suatu kejadian atau keputusan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aktor memiliki arti orang yang berperan dalam suatu kejadian penting.

a. Masyarakat Sipil

Cohen dan Arato (1992) mendefinisikan masyarakat sipil sebagai sebuah wilayah atau wadah dalam melakukan interaksi sosial yang didalamnya mencakup berbagai kelompok sosial paling akrab (keluarga), asosiasi (terutama yang bersifat sukarela), gerakan masyarakat serta berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang dapat dibuat melalui bentuk-bentuk pengaturan dan mobilisasi diri secara independen baik dalam hal program/kegiatan maupun kelembagaan.

1.8. Definisi Operasional

1.8.1. Relasi kuasa antar aktor

Relasi kuasa dalam sebuah hubungan kerjasama dapat dimasukkan dalam beberapa kategori pola hubungan, antara lain:

a. Pola Otoritarian

Pola otoritarian menempatkan posisi pemerintah pada tempat tertinggi sedangkan masyarakat berada di posisi subordinatif. Negara mendominasi proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan. Masyarakat dikondisikan pada posisi pasif dan perannya nyaris terpinggirkan. Dinamika dalam proses pengambilan keputusan yang ada lebih merupakan refleksi dari kompetisi kepentingan antar sejumlah aktor pemerintah.

b. Pola Hubungan Transisional

Pada pola ini sosok dominan dari pemerintah atau negara sudah mulai mencair dan muncul partisipasi masyarakat. Peran masyarakat serta sektor lainnya masih dibatasi oleh pemerintah dalam proses perumusan kebijakan politik. Pola hubungan transisional diwarnai oleh ketegangan, konflik, bahkan perlawanan dari masyarakat karena produk politik yang ada hanya menguntungkan pemerintah.

c. Pola Hubungan Demokratis

Pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat secara politik posisinya setara. Pemerintah tidak lagi melakukan dominasi. Pemerintah dan masyarakat sama-sama diikat oleh satu aturan main untuk saling mengisi dan

mendorong serta ada interaksi timbal balik dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Sebuah pola hubungan atau relasi tidak dapat dilepaskan dari adanya kerangka keseluruhan yang terbagi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tujuan/ nilai yang dibela: Mengidentifikasi apakah terdapat tujuan atau nilai yang dipegang oleh para aktor secara individu, kelompok, atau lembaga.
- b. Adanya aturan main: Mencoba mengungkap fakta apakah ada aturan main (*rule of the game*) dalam pengelolaan relasi. Jika ada, apakah berbentuk tertulis/perundang-undangan atau tidak tertulis dan bagaimana mekanisme bekerjanya aturan main tersebut.
- c. Komitmen moral/etos: Komitmen moral menyangkut pada konsistensi aktor yang terlibat. Dapat diwujudkan berupa tekad dan etiket, serta integritas individu dalam kelompok atau lembaga.
- d. Kepemimpinan: Lebih cenderung mengidentifikasi pada hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Melihat adakah pola ketergantungan atau kemandirian dari bawahan pada pemimpin dalam setiap sektor yang terlibat. Organisasi sebagai wadah operasional: Mengidentifikasi pelibatan organisasi baik organisasi masyarakat atau politik dalam pembentukan relasi. Sarana dan

prasarana: Mengidentifikasi apa saja sarana dan prasarana yang dipakai dalam pembentukan relasi, misalnya saja penggunaan uang sebagai sarana untuk memperkuat kekuasaan yang ada, atau dengan sarana wewenang untuk membentuk dan mengelola relasi.

1.8.2. Masyarakat sipil

Kondisi Aktual dan Peran Masyarakat Sipil:

- a) Pengawas Terhadap Negara, masyarakat sebagai warga Negara yang baik memiliki kewajiban untuk ikut mengawasi segala kebijakan yang dibuat oleh Negara sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- b) Mediator Partisipasi Masyarakat, masyarakat sipil seperti LSM mempunyai peran sebagai mediator ataupun penghubung antar masyarakat dengan Negara.
- c) *Civic Education*, salah satu peran masyarakat sipil yang dibentuk di lingkungan masyarakat untuk menyebarkan hal-hal positif di lingkungan masyarakat dengan salah satu caranya yaitu pemberian *civic education*.

Secara Praktis, definisi operasional dan konseptual di atas

Tabel 1.1

Definisi Konsep dan Operasional

No.	Definisi Konsep	Definisi Operasional	wawancara
1.	Relasi	Tujuan	W ₁
		Aturan Main	W ₂
		Kemitraan	W ₃
		Komitment	W ₄
		Kepemimpinan	W ₅
		Kekuasaan	W ₆
2.	Masyarakat Sipil	Pengawasan terhadap Negara	W ₇
		Mediator Partisipasi Masyarakat	W ₈
		<i>Civic Education</i>	W ₉

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Metode merupakan bagian terpenting dan berpengaruh dalam sukses tidaknya suatu penelitian, terutama dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2012:8) menguraikan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang naturalistik dengan kata lain, penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori.

Data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata yang bersumber dari naskah dan hasil wawancara, hasil pencatatan dilapangan, dokumentasi-dokumentasi pribadi, catatan dari memo, dan dokumen yang resmi lainnya. Aspek yang menjadi maksud atau tujuan dari penelitian kualitatif yakni gambaran mengenai realita dari observasi dan pengalaman dibandingkan hanya melihat teori dibalik kejadian atau fenomena secara rinci, mendetail, dan rampung. Penerapan pendekatan kualitatif didalam suatu penelitian, dilakukan dengan menyesuaikan antara realita yang ada dilapangan dengan teori yang ada dengan menggunakan metode deskriptif.

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial (Sarantakos, 1993:263). Robert K. Yin mengatakan bahwa studi kasus merupakan cerita yang unik dan menarik. Dapat berfokus pada suatu individu, organisasi, proses, lingkungan sekitar, institusi, ataupun kejadian disekitar kita. Hal yang dikaji dalam studi kasus ialah penielasan mengenai mengapa sesuatu yang menarik tersebut dapat

terjadi, bagaimanakah implementasi/penerapannya, dan apa yang dihasilkan dari sesuatu yang menarik tersebut (Yin, 2003:12).

Mengetahui relasi kuasa antar aktor *intermediary*, yang dalam hal ini aktor *intermediary* non-ektoral yaitu LSM SATUNAMA dengan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat cocok menggunakan metode studi kasus yang termasuk dalam jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan studi kasus maka dapat menggali secara mendalam mengenai hubungan dan tahapan yang termuat di dalamnya. Sehingga kasus yang dipaparkan akan terjawab secara rinci dan jelas.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berlokasi di kantor LSM SATUNAMA Kota Yogyakarta yang merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Lokasi penelitian tersebut dipilih sesuai dengan studi kasus yang diambil. Dengan mengambil lokasi di SATUNAMA atau Yayasan SATUNAMA akan memberikan kemudahan peneliti dalam memperoleh data-data terkait relasi kuasa antar aktor *intermediary* dan pemerintah. Peneliti akan mengetahui bagaimana relasi kuasa yang terjadi antara LSM SATUNAMA dan Pemerintah DIY dalam melakukan kerjasama.

Data dalam penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata atau hasil dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian merupakan suatu hal yang pokok untuk dijadikan rekomendasi dalam menentukan metode pengumpulan data. Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Sumber primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari Pihak LSM SATUNAMA melalui wawancara. Data primer pada penelitian relasi kuasa antara actor intermediary (LSM SATUNAMA) dan Pemerintah DIY adalah jawaban yang dirangkai oleh peneliti dari hasil wawancara mengenai relasi kuasa antara LSM SATUNAMA dengan Pemerintah DIY.

Sumber primer adalah sumber data utama yang dijadikan sebagai pusat informasi data terpenting dan yang didapatkan langsung dari sumber data. Sumber data ini dapat diperoleh dengan pengamatan langsung (observasi) maupun wawancara dan biasanya bersifat subyektif karena berasal dari sudut pandang narasumber. Sumber primer penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan ketua yayasan Satunama, , *staff* / anggota Satunama, para *volunteer* SATUNAMA.

b) Sumber sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dijadikan pelengkap atau pendukung informasi bagi data sumber primer. Data

sekunder ini didapatkan dari berbagai dokumen, peraturan walikota, studi pustaka, dan literatur yang berkaitan dengan relasi antar aktor dalam pemberlakuan suatu kebijakan. Sumber sekunder yang di dapat dari Selain itu adalah literatur yang di dapat dari hasil pencarian di perpustakaan, skripsi dan tesis sejenis, dan internet.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data untuk menjelaskan fenomena yang terjadi yaitu dengan metode wawancara, metode observasi, dan pengumpulan data sekunder. Alasan menggunakan ketiga metode tersebut adalah agar fakta yang terdapat di lapangan dapat dipaparkan secara rinci dan diperoleh validitas data. Penjabaran ketiga metode tersebut sebagai berikut:

a) Wawancara mendalam

Mantja mendefinisikan wawancara mendalam mencakup dua proses dasar, yaitu mengembangkan hubungan baik (*rappori*) dan mengejar perolehan informasi (Gunawan, 2014:167). Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang memiliki tujuan dan didahului dengan beberapa pertanyaan informal. Peneliti berusaha melakukan wawancara mendalam kepada informan yang berkompeten dan berkaitan dengan penelitian ini. Melalui teknik ini, peneliti berharap data atau

informasi yang didapatkan tersebut dapat tergali secara komprehensif karena berasal dari sumber yang bersangkutan.

Hasil wawancara selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian. Wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari seorang informan. Wawancara dilakukan di lingkungan LSM SATUNAMA.

Teknik wawancara yang digunakan dalam proses wawancara menggunakan bantuan pedoman wawancara. Hal itu dilakukan, agar pada saat proses wawancara, peneliti dapat memperoleh data-data yang diinginkan secara akurat dan tidak menyimpang dari pertanyaan rumusan masalah yang sudah dibuat. Pedoman wawancara dibuat sebagai pegangan bagi peneliti untuk membawa wawancara tersebut ke pokok permasalahan yang ingin dibahas dan tidak bersifat mengikat sehingga peneliti dapat mengeluarkan pertanyaan diluar pedoman yang sudah dibuat tersebut jika memang dibutuhkan. Dalam pengembangan materi wawancara tidak akan lepas dari pedoman wawancara yang telah dibuat. Berikut daftar narasumber penelitian ini:

Tabel 1.1 *Daftar Rencana Narasumber Penelitian*

No	Nama Narasumber	Jabatan
1.	Edi Dananto	Direktur Eksekutif Yayasan Satunama
2.	Gege Edy Purwaka	Directur Humas and Resource

3.	Asep Nanda Paramayana	Deputy Departement PMD
4.	Valentina Sri Wijati	Staff Departemen PMD

b) Observasi

S. Margono dalam Nurul Zuriah (2007:173) memaparkan bahwa observasi dapat diartikan sebagai sebuah pengamatan atau tindakan pencatatan secara sistematis dan terstruktur terhadap gejala ataupun fenomena yang muncul pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak teralalu besar. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik observasi partisipan, yaitu peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan SATUNAMA yang merupakan objek dari penelitian ini.

Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Observasi diarahkan pada suatu kegiatan mencatat fenomena yang muncul, memerhatikan secara akurat, dan memerhatikan mengenai hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Penggunaan teknik ini diarahkan pada berbagai gejala secara visual yang terjadi di lapangan yang merupakan data penting dalam

penelitian. Observasi dilakukan penulis dengan mengamati keadaan yang terjalin antara LSM SATUNAMA dengan pemerintah dalam pengambilan suatu kebijakan dan sistematika yang terjadi dalam LSM SATUNAMA dalam pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang pasti dan nyata tentang kondisi lapangan.

c) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, peraturan wali kota, literatur, dan studi pustaka yang terkait dengan relasi antar aktor dalam pemberlakuan suatu kebijakan. Data yang diperoleh dari teknik ini dipergunakan untuk melengkapi sekaligus mempertajam dalam analisis yang lebih lanjut. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari narasumber wawancara mendalam yang memiliki dokumen terkait dengan penelitian yang di angkat. Selain itu penulis menggunakan buku yang ada di perpustakaan, milik pribadi, dan internet sebagai pelengkap dan memperkuat hasil penelitian. Sumber sekunder menjadi data yang cukup penting karena mampu melengkapi sumber data primer yang belum lengkap.

d) Dokumentasi

Sugiyono (2012:240) mendefinisikan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan. Dokumen juga dapat berupa gambar misalnya foto kegiatan, gambar hidup, sketsa dalam lain-lain.

Dokumentasi dalam penelitian menggunakan sumber-sumber tertulis dari data-data kegiatan yang telah dilaksanakan oleh LSM SATUNAMA dengan Pemerintah DIY. Data tersebut dapat berupa dokumen terkait yaitu data informasi relasi kerjasama yang dilakukan oleh LSM SATUNAMA, Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan pelaksanaan kegiatan dan sarana prasarana yang telah dilaksanakan. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan maksud sebagai bukti atau pun dalam hal penguatan data yang telah diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang lain.

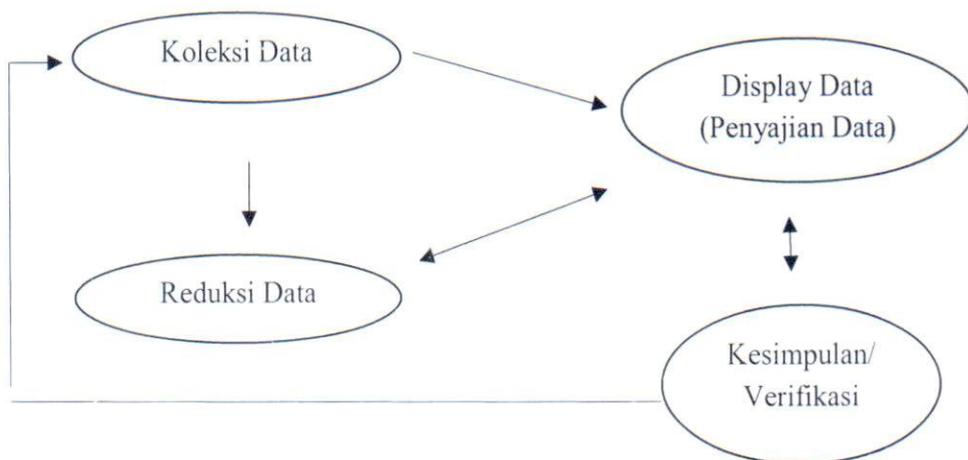
d) Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan tahapan yang dilakukan setelah tahap pengumpulan data. Analisa data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus masalah yang akan dijawab. Teknik ini sangat penting dilakukan agar data yang didapat mampu diolah dengan baik dan menghasilkan temuan penelitian. Peneliti mengelompokkan data-data yang sudah terkumpul berdasar sumber data yaitu wawancara mendalam, observasi, data

sekunder dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi yang nantinya akan dirangkai dan dianalisis. Data sekunder juga digunakan sebagai data pelengkap. Kemudian tiap data disusun dan dirangkai satu sama lain sehingga teratur dengan baik. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dari data yang sudah rapi tersebut. Dengan demikian maka penelitian ini akan menjadi penelitian yang baik dan mudah dicerna oleh para pembaca.

Gambar 1.3.

Bagan 1: Teknik Pengumpulan Data Menurut Miles dan Huberman



Sumber: Moelong, 1995

Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan atau Koleksi Data

Pengumpulan data adalah proses pencarian data dilapangan dengan menggunakan metode-metode yang telah ditentukan sebelumnya. Proses atau

tahapan dalam pengumpulan data menurut Moloeng (1995) adalah dengan orientasi dan eksplorasi. Yakni dalam orientasi dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan, sementara tahap atau proses eksplorasi yakni dilakukan setelah melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah didapatkan dari tahap pertama (pengumpulan data). Pada proses reduksi ini, peneliti mereduksi data yang ditemukan pada tahap I untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada tahap ini, peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting berguna, dan baru. Data yang dirasa tidak dipakai disingkirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian (Sugiyono, 2012:19).

3. Display Data

Display data adalah proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, tabel, matrik dan grafik dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

4. Verifikasi dan Simpulan

Pada awal pengumpulan data peneliti harus membuat simpulan sementara. Dalam tahap akhir simpulan-simpulan

tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya kearah simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan tentative yang masih perlu disempurnakan. Setelah data masuk terus menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan